



KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	12
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

APBD 2018 Sisakan Silpa Rp 95 Miliar

Bukittinggi, Padek—Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 di Kota Bukittinggi menghasilkan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) sebesar Rp 95 miliar lebih. Hal ini diungkapkan Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias saat rapat paripurna DPRD Bukittinggi, Rabu (12/6).

Rapat paripurna dengan agenda hantaran secara resmi Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2018 oleh Wali Kota itu, dipimpin Ketua DPRD Bukittinggi dan dihadiri segenap anggota dewan beserta kepala OPD.

Dalam paparannya, Ramlan Nurmatias menyebutkan, pada 2018 lalu Kota Bukittinggi kembali meraih prediket Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya secara berturut-turut dari BPK. Itu menjadi salah satu wujud akuntabilitas pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan kepada seluruh masyarakat, terutama dari aspek keuangan yang dilaksanakan dengan baik.

Wali Kota menyampaikan bahwa dalam APBD 2018 lalu, pendapatan dianggarkan sebesar Rp 720 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp 695 miliar lebih atau 96,59 persen. Sementara untuk belanja daerah

tahun 2018, dianggarkan sebesar Rp 839 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp 705 miliar lebih atau 83,97 persen.

"Berdasarkan realisasi pendapatan dan realisasi belanja diperoleh, defisit sebesar Rp 9,6 miliar lebih," ungkap Ramlan.

Untuk pos pembiayaan daerah tahun 2018, lanjut Wako, dianggarkan sebesar Rp 119 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp 105 miliar lebih atau 88,18 persen.

Sementara itu, Ketua DPRD Bukittinggi Beny Yusrial menyampaikan, hantaran Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2018 oleh wali kota ini akan segera ditindaklanjuti DPRD Bukittinggi. Di mana, setiap poinnya akan dibahas secara detail oleh badan anggaran.

"Kita targetkan pembahasan ranperda ini selama 30 hari masa kerja. *Insha Allah* pada 8 Juli nanti sudah diparipurkan. Semoga nantinya mendapat hasil terbaik untuk dasar ataupun landasan bagi Pemko dan DPRD dalam menyusun penganggaran daerah di tahun-tahun selanjutnya," harap Beny Yusrial didampingi Wakil Ketua DPRD Yontrimansyah dan Trismon. (r)